

Pengawasan Intern

by Januri Januri

Submission date: 03-Aug-2018 08:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 987170070

File name: SPI_Pajak,_KPP_Madya,_2012.doc (72K)

Word count: 1869

Character count: 12930

ANALISIS PENGAWASAN INTERN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KPP MADYA MEDAN

Januri

Dosen Fakultas Ekonomi UMSU

12

Email: janurisuyoso@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan system pengawas⁷ intern di KPP Madya Medan. Penelitian ini dilakukan dengan ⁷ pendekatan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menyimpulkan dan menyajikan data dari perusahaan untuk dianalisis sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti, jenis data yang digunakan adalah kualitatif. Data tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan tentang sistem pengawasan intern penerimaan pajak penghasilan di KPP Madya Medan dan dokumen –dokumen pendukung dalam penelitian Ha¹³ penelitian diketahui bahwa pengawasan terhadap penerimaan pajak penghasilan dilakukan berdasarkan Standard Operational Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar dilaksanakan oleh pegawai pajak. Dilihat dari account representative Wajib pajak yang telah melapor maupun yang belum lapor SPT, account representative mengkategorikan wajib pajak yang terlambat bayar dan juga terlambat lapor SPT, kemudian nota perhitungan tersebut di input system informasi DJP yang sudah disetujui oleh kepala seksi selanjutnya nota perhitungan dikirim ke seksi pelayanan untuk dicetak S⁶P (surat tagihan pajak),STP yang sudah dicetak tersebut dikirim ke Wajib pajak. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya khususnya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

Kata Kunci : Sistem Pengawasan Intern, Pajak Penghasilan

PENDAHULUAN

Peraturan perpajakannya yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu mengubah *Official Assessment Sytem* menjadi *Self Assessment Sytem*. ¹⁰ *Self Assessment Sytem* merupakan suatu sistem perpajakannya yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung , memperhitungkan, menyeter dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Pada

hakikatnya, wajib pajak lebih mengetahui seberapa besar penghasilan yang diperoleh sehingga besarnya pajak yang harus dibayar dapat wajib pajak perhitungkan sendiri. Pada kenyataannya masih banyak wajib pajak badan tidak mendaftarkan sebagai wajib pajak dan adanya wajib pajak yang belum melaporkan kewajibannya. Hal ini dikarenakan perusahaan merasa terpaksa untuk membayar pajak sehingga mereka tidak memiliki kesadaran yang timbul dari diri perusahaan itu sendiri.

Maka sampai saat ini pengawasan masih sangat menarik untuk diteliti karena dengan adanya reformasi *system* perpajakan yang menghasilkan ¹⁶ *Self Assessment Sytem* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri, maka untuk mengamankan penerimaan Negara, ⁴ Direktorat Jendral Pajak (DJP) dituntut untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban melaporkan pajak. ¹ Salah satu bentuk Pengawasan tersebut adalah melalui pemeriksaan.

Kewenangan Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan pemeriksaan tersebut diatur dalam pasal 29 undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan. Terlebih dahulu merealisasikan prediksi Dirjen Pajak mengenai pendapatan dari Pajak Penghasilan Badan. Menurut Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP-23/PJ./2002 tentang *system* pengawasan pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Menurut Ryan Andryana (2005) menyatakan bahwa untuk memaksimalkan penerimaan pajak diperlukan pengendalian intern yang baik, pengendalian intern

sebagai alat bantu mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

Berikut ini adalah table realisasi penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.

Tabel I.I Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan

Tahun	Target	Realisasi	%
2010	6.415.510.280.000	6.070.183.043.818	94,62%
2011	7.728.312.200.000	6.676.417.666.764	86,39%
2012	7.745.153.843.000	6.438.876.157.897	83,13%

Sumber : Seksi Pengolahan data dan Informasi KPP Madya Medan

Dari table menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak penghasilan didukung oleh efektif tidaknya penerapan pengawasan intern. Sistem pengawasan intern dalam penerimaan pajak penghasilan tidak hanya berbicara tentang masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak, tapi butuh peran yang penting dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan melakukan Sistem Pengawasan Intern yang baik agar semua pihak terkait di dalam penerimaan pajak penghasilan.

KAJIAN TEORI

Pengertian Sistem

Suatu perusahaan beroperasi dengan baik, apabila perusahaan tersebut menggunakan sistem dan prosedur yang baik. Dikatakan baik apabila dapat mempermudah tercapainya tujuan perusahaan tersebut.

Mulyadi (2011) menyatakan : “Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsure yang erat hubungannya satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.”

Pengertian Pengendalian Intern

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian intern di definisikan sebagai berikut :

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”

Jadi, pengendalian internal adalah proses yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk mencapai tujuan keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi serta memberikan keyakinan yang memadai bahwa semua aktivitas organisasi sudah berjalan efektif dan efisien.

Mulyadi (2001) menyatakan bahwa: Pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijadikan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut :

- a. Keandalan Pelaporan Keuangan
- b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- c. Efektivitas dan efisiensi operasi

3 Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Alasan perusahaan untuk menerapkan pengendalian intern adalah untuk membantu pimpinan agar perusahaan dapat mencapai tujuan dengan efisien.

Tujuan Pengendalian Intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian empat golongan tujuan :

- (a) Menjaga kekayaan organisasi
- (b) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
- (c) Mendorong efisien
- (d) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

2 1. Pengertian Sistem Pengendalian Pemerintah

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3 Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Pelaksanaan struktur pengendalian intern yang efisien dan efektif haruslah mencerminkan keadaan yang ideal. Namun dalam kenyataan hal ini sulit untuk

dicapai, karena dalam pelaksanaan struktur pengendalian intern mempunyai keterbatasan - keterbatasan.

COSO (2013) menjelaskan mengenai keterbatasan – keterbatasan pengendalian intern bahwa pengendalian internal tidak bisa mencegah penilaian buruk atau keputusan atau kejadian eksternal yang dapat menyebabkan semua organisasi gagal untuk mencapai tujuan operasionalnya. Dengan kata lain, bahkan sistem pengendalian intern yang efektif dapat mengalami kegagalan.

Pengertian Pengawasan

Pengertian pengawasan menurut Siagian, (2003:112) adalah “Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya”

Pengertian pengawasan menurut (T. Hani Handoko, 2008: 25) dalam buku Manajemen “Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan”

Sistem Pengawasan Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak adalah “Sistem pengawasan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak dengan menggunakan peralatan teknologi informasi yang terintegritas”

Proses Pengawasan dan Tipe-Tipe Pengawasan

a. Proses Pengawasan

Pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien bila didukung oleh system yang baik dari pada pengawasan menurut T. Hani Handoko (2003,hal 362) adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan standar pelaksanaan (perencanaan)
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata
4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standard an penganalisaan penyimpangan-penyimpangan
5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu

b. Tipe-Tipe Pengawasan

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh)

Setelah diketahui Subjek Pajak dan Objek Pajak maka langkah berikutnya adalah menghitung besarnya PPh yang terutang. Komponen untuk menghitung besarnya PPh yang terutang adalah tarif Pajak Penghasilan diketahui dasar perhitungan pajak

Tarif Pajak Penghasilan menentukan besarnya jumlah PPh yang terutang yang berupa persentase tertentu yang sudah ditetapkan UU PPh. Sedangkan dasar perhitungan pajak menurut UU PPh ada yang berdasarkan jumlah penghasilan bruto dan ada juga yang berdasarkan jumlah penghasilan neto dan tergantung jenis penghasilannya.

12

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yakni penelitian dengan menganalisis data penerimaan pajak penghasilan yang diperoleh dari hasil penelitian serta membandingkan dengan teori yang ada, kemudian dianalisis

penerapannya dalam praktik yaitu menganalisis sistem pengendalian intern terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Penghasilan.

9

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian dari seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Medan.

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

9

C. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif menggambarkan tentang kondisi penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Madya Medan. Data tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan tentang sistem pengawasan intern penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Madya Medan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode deskriptif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan dalam Sistem Pengawasan Intern Pada KPP Madya Medan

Pada umumnya fiskus memiliki buku penjaminan atas semua kewajiban perpajakan wajib pajak, beberapa diantaranya sudah ditampilkan sistem informasi perpajakan (SI DJP) yang merupakan sistem aplikasi terpadu yang mengawasi kegiatan Wajib Pajak dan sesuai dengan SOP :

1. account representative Wajib pajak yang telah melapor maupun yang belum lapor SPT
2. account representative mengkatagorikan wajib pajak yang telambat bayar dan juga terlambat lapor SPT
3. kemudahan nota perhitungan tersebut di input system informasi DJP yang sudah disetujui oleh kepala seksi
4. selanjutnya nota perhitungan dikirim ke seksi pelayanan untuk dicetak STP (surat tagihan pajak)
5. STP yang sudah dicetak tersebut dikirim ke Wajib pajak.

2. Hambatan dalam Pengawasan Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Hambatan yang dialami diantaranya :

- a) Jumlah fiskus yang terbatas, sedang semakin banyak peningkatan jumlah wajib pajak. Semakin meningkatnya jumlah wajib pajak dengan adanya *self assessment sytem* dimana wajib saat ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung membayar dan/atau menyeterorkan pajaknya sendiri baik atas pajak penghasilan sendiri ataupun pajak yang harus dipotong atau dipungut menjadi kewajibannya pajak.
- b) Meningkatkan pengawasan lebih ketat lagi terhadap wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban pembayaran pajaknya dengan menerbitkan surat teguran pajak. Secepat mungkin memberikan tindak lanjut dalam bentuk himbauan kepada wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam

melaporkan kewajiban perpajakannya. Dan menghimbau wajib pajak untuk konsultasi kepada AR yang sudah ditetapkan.

c) Diadakannya sosialisasi mengenai pajak secara personal maupun masal. Mensosialisasikan kepada wajib pajak secara personal wajib pajak menemui AR atau sebaliknya, maupun pihak fiskus mendatangi kantor atau instansi tentang cara pelaporan pajak yang ditanggungnya secara benar.

d) Meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pajak melalui penyuluhan media. Menyadarkan wajib pajak betapa pentingnya pajak bagi Negara dengan lebih memperbanyak penyuluhan di media social dan pamflet-pamflet tentang pajak.

Kesimpulan

1. Pelaksanaan system Pengawasan Intern di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan sudah baik. Artinya System Pengawasan Intern telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai *Standard Operational Procedure* (SOP), serta Undang-Undang Pajak yang berlaku.
2. Tingkat Pengawasan Pada Penerimaan Pajak Penghasilan sudah baik. Dengan system informasi secara online petugas dapat mengawasi kegiatan wajib pajak serta melihat secara langsung ketaatan wajib pajak dalam membayar pajaknya. sehingga dapat membantu rencana Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

3. Hambatan dalam Pengawasan pada Penerimaan Pajak Penghasilan yaitu keterbatasan data-data wajib pajak yang tidak mencukupi, keterbatasan fiskus, dan kurang sadarnya wajib pajak dalam pembayaran pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang hartadi, (2002). Sistem Pengendalian Intern. Edisi kedua. BFG. Yogyakarta
- 21 Dasaratha v. Rama/Frederick L. Jones. (2009). Sistem Informasi Akuntansi.
- 15 Desi Pakalong. (2012) Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas pada Rumah sakit Gunung Maria di Tamohon. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Jurnal EMBA Vol. I No.4, Desember
- Early, Suandy. (2011). Hukum Pajak. Jakrta. Salemba Empat
- Ilyas, B. Wirawan dan Rudy Suhartono (2013). *Perpajakan*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- 14 Lukman.dkk. (2011). Pengaruh Struktur Pengendalian Intetrn (SPI) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajibannya Di Kota Makssar. Jurnal
- 20 Mardiasmo.(2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- 17 Michell Suharli. (2006). Akuntansi Untuk Bisnis Jasa dan Dagang. Yogyakarta : Graham Ilmu
- Priantara, Diaz (2013). *Perpajakan Indonesia, Edisi 2 Revisi*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- 8 Resmi,Siti. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat : Jakarta Selatan
- Romey, dkk. (2010). Accounting Informasi Sytem. Edisi Ksembilan. 8 Salemba Empat. Jakarta
- Waluyo.(2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono. (2009). Pajak Penghasilan. Edisi Revisi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- Maridi. (2011). Sistem Informasi Akuntansi. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Pengawasan Intern

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

elib.unikom.ac.id

Internet Source

3%

2

Submitted to Universitas Jenderal Soedirman

Student Paper

3%

3

nonosun.wordpress.com

Internet Source

2%

4

repository.usu.ac.id

Internet Source

2%

5

nofitaayur.blogspot.com

Internet Source

1%

6

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

1%

7

Satrijo Budi Wibowo. "ANALISIS RASIO KEUANGAN SEBAGAI ALAT UKUR KINERJA PERUSAHAAN PADA PT. ASTALIA MILLENIA EDUCATINDO CABANG MADIUN", Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 2013

Publication

1%

fe-akuntansi.unila.ac.id

8	Internet Source	1%
9	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
10	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
11	publication.gunadarma.ac.id Internet Source	1%
12	journal.student.uny.ac.id Internet Source	1%
13	Submitted to Universiti Malaysia Perlis Student Paper	1%
14	www.scrubbercare.com Internet Source	1%
15	library.binus.ac.id Internet Source	1%
16	grahailmu.co.id Internet Source	1%
17	Submitted to Surabaya University Student Paper	1%
18	issuu.com Internet Source	1%
19	www.bpk.go.id Internet Source	1%

20

jurnal.fe.uad.ac.id

Internet Source

<1%

21

eprints.umm.ac.id

Internet Source

<1%

22

infoadasemua.blogspot.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On